

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SIKLUS  
PENGGAJIAN PADA KANTOR SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SULAWESI SELATAN**

**FITRI AISYAH**  
**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

---

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the Payroll Cycle Accounting Information System at the South Sulawesi Regional Representative Council Secretariat Office in 2017 can be seen through a flowchart. This research is a descriptive study, the data used are primary and secondary data in the form of interviews and documents, while the data analysis method used is a qualitative descriptive analysis method. The results of the study show that the payroll cycle at the Regional Representative Council Secretariat of South Sulawesi in 2017 was in accordance with the theory out forward by Romney and Steinbart's with change at the time of salary receipt by giving direct power to the bank with SP2D (Fund Disbursement Order) to transfer some money to each employee's account.*

---

**Keywords:** *Accounting Information System, Payroll Cycle, Flowchart*

**PENDAHULUAN**

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah suatu instansi pemerintahan yang bergerak dalam bidang pelayanan administrasi daerah. Kegiatan instansi pemerintahan ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat Makassar pada khususnya dan semua masyarakat yang membutuhkan pelayanan administrasi. Salah satu sistem yang paling berpengaruh dalam menunjang kelancaran pelayanan masyarakat adalah sistem penggajian, hal ini dikarenakan sistem penggajian sangat erat kaitannya dengan pegawai.

Dalam hal ini Pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien untuk mempertahankan eksistensinya sehingga pengetahuan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk membantu pihak yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan. Informasi dituntut untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu yang akurat, relevan dan tepat waktu sehingga keputusan yang tepat dapat dibuat yang disesuaikan dengan sistem informasi akuntansi masing-masing instansi, dengan demikian pengelolaan sistem informasi dalam penggajian merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Pentingnya sistem informasi dalam penggajian bagi pemerintah adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan atau pengeluaran instansi yang fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah”. Sistem informasi dalam penggajian menggambarkan atau mendeskripsikan sistem pencatatan yang terkomputerisasi ke pencatatan yang berupa bagan alur flowchart. Dengan adanya sistem informasi penggajian dari awal sampai gaji itu dibayarkan sesuai dengan hak masing-masing pegawai dapat dilaksanakan dengan sistematis dan diharapkan tidak akan terdapat kesalahan dalam prosedur penggajian, dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat sistem penggajian secara manual dirasakan sudah kurang mampu memberikan manfaat yang memadai bagi perhitungan gaji pegawai.

Artikel ini membahas mengenai analisis system informasi akuntansi siklus penggajian pada Kantor Perwakilan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan

## **TINJAUAN TEEORITIS**

### **Gaji dan Siklus Penggajian**

Menurut Moekijat (2012:6) “Gaji merupakan imbalan jasa atas kerja yang telah dilakukan pegawai selama sebulan”. Dalam memberikan gaji Pemerintah memiliki sistem penggajian secara nasional terhadap Pegawai Negeri sipil baik pusat maupun daerah. Gaji yang diberikan kepada pegawai negeri berbeda-beda sesuai dengan Pangkat/Golongan Ruang, Jabatan, Tunjangan Isteri/Suami, Tunjangan anak dan masa kerja. Dalam melakukan perhitungan gaji, terkadang instansi mengalami beberapa kesulitan. Kesulitan tersebut biasanya disebabkan oleh banyaknya jumlah pegawai dan singkatnya waktu yang digunakan dalam perhitungan gaji. Masalah penggajian menjadi sangat penting dalam pemerintahan karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Penanganan gaji pegawai yang kurang cermat dan tidak efektif dapat mempengaruhi struktur APBD yang telah disusun berdasarkan tahun anggaran yang berjalan.

Menurut Jogiyanto (2014:43) “Pentingnya sistem informasi dalam penggajian bagi pemerintah adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan atau pengeluaran instansi yang fiktif sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah”. Sistem informasi dalam penggajian menggambarkan atau mendeskripsikan sistem pencatatan yang terkomputerisasi ke pencatatan yang berupa bagan alur flowchart. Dengan adanya sistem informasi penggajian dari awal sampai gaji itu dibayarkan sesuai dengan hak masing-masing pegawai dapat dilaksanakan dengan sistematis dan diharapkan tidak akan terdapat kesalahan dalam prosedur penggajian, dengan berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat sistem penggajian secara manual dirasakan sudah kurang mampu memberikan manfaat yang memadai bagi perhitungan gaji pegawai.

**Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah (2011) dengan judul “Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian pada Yayasan Pembangunan Indonesia (YASPI) Di Kota Makassar”. Tujuan Penelitian untuk menerapkan sistem akuntansi penggajian pada Yayasan Pembangunan Indonesia (YASPI) di kota Makassar yang efektif dan efisien maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan sistem baru akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang dilakukan para pegawai serta mengatasi masalah prosedur dan dokumen penggajian yang terjadi sehingga sasaran sistem informasi yang diinginkan dapat tercapai di Yayasan Pembangunan Indonesia (YASPI) di Kota Makassar.

Penelitian yang dilakukan oleh Yohana (2016) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian Pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa”. Tujuan Penelitian untuk menganalisis mengenai penerapan sistem informasi siklus penggajian pada kantor Pemerintah Kabupaten Gowa maka dapat disimpulkan bahwa penerapan siklus penggajian pada kantor pemerintah kabupaten gowa tepatnya di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sudah terkomputerisasi sejak tahun 1999 dan berjalan dengan baik, sesuai sistem penggajian kantor pemerintah kabupaten gowa yang telah menerapkan sistem pengendalian yang baik karena pelaksanaannya sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang perubahan ke 16 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997.

**METODE PENELITIAN****Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam ( in-depth analysis ), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi tetapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian kualitatif.

Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian adalah suatu sistem dalam sebuah perusahaan yang berulang dan diperoleh dari pengumpulan, pengolahan data transaksi yang terkait dalam manajemen dan efektif atas tenaga kerja.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart (2015) yang menyatakan bahwa dalam tahap akhir penerimaan gaji terdapat dua cara. Yang pertama yaitu pembayaran secara langsung dengan maksud bagian bendahara bertemu secara langsung dengan pegawai untuk memberikan gaji dan yang kedua yaitu dengan melibatkan pihak bank, dimana bagian keuangan memberikan wewenang kepada pihak bank untuk mentransfer ke rekening masing-masing pegawai.

Dalam kaitannya, siklus penggajian yang diterapkan oleh kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan adalah sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart namun jika dilihat lebih teliti pada tahap akhir pembayaran dimana teori Romney dan Steibart menggunakan dua cara, maka yang terjadi di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan hanya menggunakan satu cara yaitu transfer dimana bagian keuangan memberikan kuasa langsung kepada bank dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk transfer langsung ke rekening masing-masing pegawai.

### a. Ringkasan Hasil Evaluasi Siklus Penggajian

Ringkasan hasil evaluasi siklus penggajian pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Evaluasi Siklus Penggajian

No.	Keterangan	Ya	Tidak
1.	Otorisasi Transaksi		
	a. Apakah otorisasi transaksi telah dilakukan ?	✓	
	b. Apakah setelah dilakukan otorisasi transaksi oleh bendahara daftar gaji wajib dicetak ?	✓	
2.	Pembagian Tugas		
	a. Apakah setiap pegawai mengetahui prosedur kerja ?	✓	
	b. Apakah pembagian tugas		✓

	dilakukan oleh pegawai itu sendiri ?		
3.	Supervisi a. Apakah supervisi dilakukan oleh kepala bidang masing-masing ? b. Apakah ada selain supervisi yang membuat aturan dan memberikan tindakan tegas jika aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya ?	✓	✓
4.	Catatan Akuntansi a. Apakah catatan akuntansi sudah jelas ? b. Apakah belanja gaji, belanja rutin, barang dan jasa sudah terverifikasi dengan jelas ?	✓ ✓	
5.	Pengendalian Akses a. Apakah setiap operator komputer dapat mengakses langsung ke server ? b. Apakah bagian persidangan, umum, keuangan dan perundang-undang dan informasi dibawah oleh Sekretariat Dewan ?	✓ ✓	
6.	Verifikasi Independen a. Apakah ada verifikasi independen yang memvalidasi jumlah permintaan bendahara untuk menerbitkan SKO dan SP2D ? b. Apakah absen tidak mempengaruhi besarnya gaji ? c. Apakah pegawai yang tidak hadir maksimal 2 minggu diberikan teguran ?	✓ ✓ ✓	
	Jumlah	11	2
	Total Jawaban	13	

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara jumlah jawaban “Ya” yang diperoleh dan jumlah total jawaban. Semakin tinggi rasio semakin efektif.

Diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai >100% berarti efektif.
- b. Jika diperoleh nilai 85 s.d. 99% berarti cukup efektif.
- c. Jika diperoleh nilai 65 s.d. 84% berarti kurang efektif.
- d. Jika diperoleh nilai <65% berarti tidak efektif.

$$\begin{aligned}\text{Efektivitas} &= \frac{11}{13} \times 100\% \\ &= 85\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil evaluasi dan dihitung dengan rumus yang ada dan memperoleh nilai yaitu 85% maka sudah jelas hasilnya adalah cukup efektif.

#### **b. Analisis Data Hasil Penelitian**

1. Apakah otorisasi transaksi telah dilakukan ?

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa otorisasi transaksi sudah dilakukan oleh Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan. Otorisasi transaksi sangat penting dilakukan agar mengurangi timbulnya penggelapan gaji oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Otorisasi transaksi dilakukan dari bendahara ke operator gaji.

2. Apakah setelah dilakukan otorisasi transaksi oleh bendahara daftar gaji wajib dicetak ?

Otorisasi transaksi dilakukan dari bendahara ke operator gaji lalu operator gaji mencetak daftar gaji setelah itu diserahkan kembali ke bendahara lalu bendahara menyerahkan ke pimpinan kantor dalam hal ini kepala dinas untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Perintah Pembayaran (SP2D).

3. Apakah setiap pegawai mengetahui prosedur kerja ?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan pembagian tugas sudah terbagi habis dan ditetapkan dengan jelas agar pegawai dapat mengetahui prosedur kerja yang harus dilakukan.

4. Apakah pembagian tugas dilakukan oleh pegawai itu sendiri ?

Pembagian tugas tersebut dilakukan oleh Kepala Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan.

5. Apakah supervisi dilakukan oleh kepala bidang masing-masing ?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan supervisi dilakukan oleh kepala bidang masing-masing agar memberikan tindakan tegas dan dapat membuat aturan berjalan dengan tertib dan sebagaimana mestinya.

6. Apakah ada selain supervisi yang membuat aturan dan memberikan tindakan tegas jika aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya ?

Tidak ada selain supervisi yang membuat aturan dan memberikan tindakan tegas jika aturan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

7. Apakah catatan akuntansi sudah jelas ?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan catatan akuntansi telah jelas dan mudah.

8. Apakah belanja gaji, belanja rutin, barang dan jasa sudah terverifikasi dengan jelas ?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan catatan akuntansi telah jelas dan mudah dalam melakukan rekam jejak akuntansi telah terverifikasi dengan jelas baik berupa belanja gaji, belanja rutin, belanja barang dan jasa telah dicatat oleh bagian yang menangani.

9. Apakah setiap operator komputer dapat mengakses langsung ke server ?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan dilakukan pengendalian akses yang masing-masing bidang telah memiliki operator komputer yang dapat mengakses langsung ke server.

10. Apakah bagian persidangan, umum, keuangan dan perundang-undang dan informasi dibawah oleh Sekretariat Dewan ?

Terdapat 4 (empat) bagian yang dibawah oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan yaitu:

- a) Bagian Persidangan
- b) Baian Umum
- c) Bagian Keuangan
- d) Bagian Perundang-undangan dan Informasi

11. Apakah ada verifikasi independen yang memvalidasi jumlah permintaan bendahara untuk menerbitkan SKO dan SP2D ?

Ya ada karena pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan verifikasi independen yang memvalidasi jumlah permintaan bendahara untuk menerbitkan SKO dan SP2D.

12. Apakah absen tidak mempengaruhi besarnya gaji ?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan Absen tidak mempengaruhi besarnya gaji yang diterima masing-masing pegawai setiap bulannya hanya ketidakhadiran dari pegawai tersebut dapat mempengaruhi jumlah insentif, honor dan lembur yang diterima.

13. Apakah pegawai yang tidak hadir maksimal 2 minggu diberikan teguran?

Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan pegawai yang tidak hadir maksimal 2 minggu akan diberikan teguran secara berjenjang sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

### **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan siklus penggajian pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan hampir sama dengan siklus penggajian yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart. Adapun



perbedaannya adalah pada saat penerimaan gaji kepada karyawan, dalam teori Romney dan Steinbart gaji karyawan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu melalui bank yang di transfer ke rekening masing-masing pegawai atau melalui penerimaan gaji secara langsung. Sedangkan siklus penggajian yang terjadi di Kantor Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan adalah dengan memberikan kuasa langsung kepada bank dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening masing-masing pegawai.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan siklus penggajian pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan hampir sama dengan siklus penggajian yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart. Adapun perbedaannya adalah pada saat penerimaan gaji kepada karyawan, dalam teori Romney dan Steinbart gaji karyawan dapat diperoleh dengan dua cara yaitu melalui bank yang di transfer ke rekening masing-masing pegawai atau melalui penerimaan gaji secara langsung. Sedangkan siklus penggajian yang terjadi di Kantor Sekretaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan adalah dengan memberikan kuasa langsung kepada bank dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening masing-masing pegawai.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, R.S. 2006. *Manajemen Penggajian dan Pengupahan*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Amir, Y. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anwar, M.K dan Oetojo S,Asianti. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baridwan, Z. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Febrianti, W. 2009. *Analisis Pengendalian Intern atas Sistem Penggajian dan Pengupahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hall, J.A. 2009. *Accounting Information System*. Jakarta: Salemba Empat.

- Jeremias, K.T. 2003. *Kinerja Pemerintah Daerah dan Pendekatan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jogiyanto, H. 2014. *Sistem Informai Akuntansi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kadir, A. 2009. *Pengenalan Sistem Informasi Pemerintahan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Kurniawan, D. 2009. *Sistem Pengendalian Intern Penggajian*. Yogyakarta: BPFE.
- Krismiaji, 2005. *Sistem Informasi Akuntansi Akademi Manajemen Perusahaan*. Yogyakarta: YPKN.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Bersih.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Anggota IKAPI: GHALIA. Indonesia
- Moekijat. 2012. *Administrasi Gaji dan Upah*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi. 2000. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, Marshall B and Paul John Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat
- Setyosari, P. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan & Pengembangan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W.V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Sutanto, A. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

\_\_\_\_\_. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Sutabri, T. 2004. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

\_\_\_\_\_. 2012. *Konsep Sistem Informasi*. Jakarta: Andi.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: BPFE.

Suwardjono. 2002. *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: BPFE.

Widjajanto, N. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

Wiwinto. 2013. *Analisis Sistem Akuntansi Penggajian*. Jakarta: PT. Anfa Media.

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Tangerang: Graha Ilmu.

Yani, A. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Sumber Lain**

Musdalifah. 2011. *Penerapan Sistem Akuntansi Penggajian pada Yayasan Pembangunan Indonesia (YASPI) Di Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.

Yohana, Desi. 2016. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Siklus Penggajian Pada Kantor Pemerintah Kabupaten Gowa*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 184 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.